



BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-212/BPS/2310/03/2018

Jakarta, 1 Maret 2018

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya formasi Deputi Bidang Statistik Sosial

Kepada Yang Terhormat:

(daftar terlampir)

di

Tempat

Dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya formasi Deputi Bidang Statistik Sosial (eselon Ia) pada Badan Pusat Statistik, dengan hormat kami mengundang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah di Instansi Saudara yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan dimaksud.

Sehubungan dengan hal di atas, kami mohon bantuan Saudara menginformasikan kepada PNS di instansi Saudara mengenai seleksi terbuka tersebut sebagaimana pengumuman terlampir. Informasi persyaratan dan tahapan seleksi dapat dilihat melalui laman <http://rekrutmen.bps.go.id>.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Ketua Panitia Seleksi JPT Madya

Badan Pusat Statistik,



AKHMAD JAELANI

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.
3. Kepala Badan Pusat Statistik.

27 MAR 2018

0005901 *SEKRET*

15 MAR 2018

Lampiran

Surat Ketua Panitia Seleksi JPT Madya BPS

Nomor : B-212/BPS/2310/03/2018

Tanggal : 1 Maret 2018

DAFTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH

KEMENTERIAN/LEMBAGA

- 1 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- 2 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 3 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- 4 Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- 5 Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri
- 6 Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM
- 7 Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
- 8 Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 9 Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 10 Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- 11 Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
- 12 Sekretaris Jenderal kementerian Ketenagakerjaan
- 13 Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 14 Sekretaris Kementerian Pariwisata
- 15 Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 16 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- 17 Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 18 Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 19 Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 20 Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan
- 21 Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- 22 Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
- 23 Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
- 24 Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan
- 25 Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
- 26 Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- 27 Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara
- 28 Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
- 29 Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN
- 30 Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- 31 Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 32 Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 33 Sekretaris Utama Arsip Nasional RI (ANRI)
- 34 Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara
- 35 Sekretaris Utama Badan Inteljen Negara (BIN)
- 36 Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- 37 Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- 38 Sekretaris Kalakhar Badan Keamanan Laut (BAKAMLA)
- 39 Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- 40 Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- 41 Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional (BNN)
- 42 Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- 43 Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- 44 Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- 45 Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
- 46 Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 47 Sekretaris Utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
- 48 Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- 49 Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
- 50 Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional (BSN)
- 51 Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
- 52 Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- 53 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- 54 Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- 55 Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- 56 Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
- 57 Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 58 Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
- 59 Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

PEMERINTAH DAERAH

1. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
6. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
7. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
8. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
9. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta ✓
12. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
13. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
14. Sekretaris Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta
15. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
16. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
17. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
18. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
19. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
20. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
21. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
22. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
23. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
24. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
25. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
26. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
27. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
28. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
29. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
30. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
31. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara
32. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
33. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat